

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Dapat di bagi menjadi empat studi pembahasan sebagai berikut:

1. Adanya Kesesuaian antara Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan yang Berlaku. Pemerintah Desa Tegalrejo telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di tahun 2016 dengan antara RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalrejo Tahun 2014-2019, dan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 07 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalrejo Tahun 2016.
2. Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 memiliki kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sementara dari segi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan waktu realisasi penyelesaiannya sudah sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah di tentukan. Namun dalam dokumen pelaksanaan tersebut hanya sebatas waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan program pembangunan infrastruktur, tidak ada rincian kapan waktu pelaksanaannya.

3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Tegalrejo tahun 2016 dapat disimpulkan kurang baik. Hal ini didapat dilihat dari:
 - a. Dari segi perencanaan yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Desa Tegalrejo cenderung hanya melibatkan masyarakat yang selalu setuju dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah desa. Sedangkan masyarakat yang benar-benar memikirkan keberlangsungan pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran (kritis), malah tidak di libatkan dalam Musrenbang Desa Tegalrejo.
 - b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 selalu melibatkan masyarakat baik keterlibatan bentuk fisik maupun finansial. Kemudian setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing proyek pembangunan infrastruktur, diinformasikan melalui papan informasi yang disediakan tiap dusun dan tiap obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
 - c. Bentuk evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam transparansi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo diantaranya adalah: Keluhan masyarakat yang menyampaikan adanya selisih jumlah anggaran antara jumlah anggaran yang sesuai di pasar dengan realisasi. Kemudian dalam penyampaian bentuk Sistem Informasi Desa (SID) website desa yang masih kurang baik. Hal itu disebabkan karena SDM yang kurang memadai untuk menjalankan tugas ini dan harus adanya pendampingan terhadap pengelolaan website desa agar dapat menyampaikan bentuk laporan desa bukan hanya dalam program pembangunan infrastruktur saja, namun

dalam keseluruhan program kerja kegiatan Pemerintah Desa Tegalrejo, sehingga dapat tercapainya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.

4. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa belum maksimal. Ada dua model partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi murni dan semu.
 - a. Partisipasi murni yaitu keterlibatan masyarakat dalam menganalisis bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, dan keikutsertaan Masyarakat Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan kegiatan hingga melakukan swadaya masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti **temuan analisis di atas**.
 - b. Partisipasi semu dikaitkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo tidak melibatkan masyarakat yang aktif dalam mengkritisi kinerja pemerintah, melainkan yang dilibatkan hanya masyarakat yang berpihak pada pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur.

Dari beberapa penjelasan di atas ditemukan beberapa persoalan yang menjadikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016 kurang maksimal, diantaranya adalah:

- 1) Belum ada rincian waktu terkait waktu pelaksanaan program pembangunan infrastruktur
- 2) Kurang transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur
- 3) Belum semuanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

- 4) Belum maksimal dalam pemanfaatan Sistem Internet Desa (SID) sebagai sarana untuk menginformasikan laporan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur
- 5) Perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

4.2 Rekomendasi

- 1) Pemerintah Desa Tegalrejo harus memberikan laporan yang lengkap dan rinci terkait waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
- 2) Pemerintah Desa Tegalrejo harus lebih transparan terhadap penyampaian laporan penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur.
- 3) Dalam segala kegiatan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya
- 4) Diadakannya pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur desa terkait pengelolaan Dana Desa serta pengelolaan SID sebagai sumber informasi.
- 5) Harus adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat agar terbentuknya sinergitas dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.
- 6) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penelitian tentang inovasi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa berbasis IT.